

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

RPJMD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis keuangan. Analisis keuangan dilakukan dengan menelaah kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan proyeksi anggaran periode tahun rencana. Analisis keuangan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 didasarkan pada data dokumen APBD dan laporan keuangan tahunan selama kurun waktu 2009-2014. Secara umum meliputi 2 (dua) komponen yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dengan uraian :

1. **Analisis Penerimaan Daerah**, meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perilaku dan karakteristik potensi penerimaan daerah kurun waktu 2009-2013, untuk selanjutnya menjadi dasar perkiraan kapasitas keuangan daerah kurun waktu 2014-2019.
2. **Analisis Pengeluaran Daerah**, meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran efektivitas alokasi atau kebijakan anggaran, untuk selanjutnya menjadi dasar perumusan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Ende kurun waktu 2014-2019.

3.1. *Kinerja Keuangan Masa Lalu*

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD meliputi perkembangan pendapatan, proporsi pendapatan, capaian kinerja pendapatan dan realisasi belanja.

1) **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Ende selama kurun waktu 2009-2014 terus mengalami peningkatan, dari besaran Rp 461 Milyard pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 771 Milyard pada penetapan APBD Tahun anggaran 2014, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,85%. Berdasarkan telaahan masing-masing komponen, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 20,61%, diikuti Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah (LLPDyS) sebesar 13,15% dan Dana Perimbangan sebesar 9,92%.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ende T.A. 2010 – 2014 (jutaan)

U R A I A N	2010	2011	2012	2013	APBD 2014	Rata2 Pertumbuhan
PENDAPATAN	461,238	555,240	643,314	689,785	771,833	10.85
PAD	18,714	20,357	32,784	42,292	47,762	20.61
Pajak Daerah	3,425	4,348	4,842	7,343	12,202	28.93
Retribusi Daerah	7,599	8,481	17,307	5,628	12,333	10.17

U R A I A N	2010	2011	2012	2013	APBD 2014	Rata2 Pertumbuhan
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	1,332	2,353	2,954	3,220	2,954	17.27
Lain2 PAD yang syah	6,356	5,173	7,679	26,100	20,271	26.11
DANA PERIMBANGAN	386,474	451,424	553,585	585,134	620,131	9.92
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	19,714	17,884,	18,821	18,789	10,668	-11.56
Dana Alokasi Umum	332,008	375,905	459,254	506,181	546,281	10.47
Dana Alokasi Khusus	34,752	57,634	75,508	60,164	63,181	12.70
LLPDyS	56,049	83,458,	56,944	62,359	103,939	13.15
Pendapatan Hibah	57	100	0	0	0	-100
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	3,004	4,293	6,667	5,731	13,146	34.34
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50,037,	79,065	48,926	56,627	88,846	12.17
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,949	0	1,350	0	1,945,	-7.98

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

Meskipun menunjukkan perkembangan positif, PAD belum memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Ende masih relatif terbatas. Data menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2009-2014, komponen PAD memberikan kontribusi relatif kecil, dan keadaan terakhir tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 6,13% dari keseluruhan pendapatan daerah. Ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui alokasi Dana Perimbangan masih tinggi, dengan besaran yang berfluktuatif dan secara keseluruhan menunjukkan penurunan yaitu dari 93,68% pada keadaan tahun 2009, menurun pada angka 84,83% pada keadaan tahun 2013.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah juga memberikan kontribusi fluktuatif. Dari keadaan 2,27% pada tahun 2009, meningkat tajam menjadi 12,15% pada tahun 2010, dan 15,03% pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 kembali menurun dengan porsi anggaran sebesar 9,04%. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah sebagian besar merupakan dana *earmarking* atau dana terikat yang peruntukannya sebagian besar merupakan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD pada sub komponen Dana Penyesuaian, termasuk Dana penyesuaian infrastruktur yang diperoleh pada kurun waktu 2009-2011. Sumber penerimaan lainnya pada komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Syah, seperti dana hibah, dana bagi hasil provinsi dan bantuan keuangan kontribusinya belum signifikan. Gambaran proporsi sumber pendapatan daerah Kabupaten Ende selama tahun 2009-2014 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah 2009-2013 (dalam %)

U R A I A N	2009	2010	2011	2012	2013
PAD	4.05	4.06	3.67	4,25	6,13
Hasil Pajak Daerah	0.89	0.74	0.78	0,73	1,06
Hasil Retribusi Daerah	1.56	1.65	1.53	1,86	0,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.23	0.29	0.42	0,46	0,47
Lain2 PAD yang syah	1.37	1.38	0.93	1,19	3,78
Dana Perimbangan	93.68	83.79	81.30	86,71	84.83
Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak	4.42	4.27	3.22	2,86	2,72
Dana Alokasi Umum	72.95	71.98	67.70	72,01	73,38
Dana Alokasi Khusus	16.31	7.53	10.38	11,84	8,72
LLPDyS	2.27	12.15	15.03	9,04	9.04
Pendapatan Hibah	0.93	0.01	0.02	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.58	0.65	0.77	1,16	0,83
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		10.85	14.24	7,67	8,21
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.75	0.64	0.00	0,21	0

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

Selanjutnya berdasarkan tinjauan realisasi capaian pendapatan, menunjukan bahwa kinerja pendapatan daerah periode 2009-2013 pada kisaran 98% - 99,43%, dengan catatan pada 2 (dua) komponen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kinerja di bawah 90%. Gambaran kinerja realisasi pendapatan kurun waktu 2009-2013 disajikan dalam tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3. Kinerja Realisasi Pendapatan 2009-2013

URAIAN	Kinerja/Realisasi (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN	98.02	98	98	99,42	98,90
Pendapatan Asli Daerah	86.08	86.1	86	79,65	102,28
Hasil Pajak Daerah	85.12	85.1	85	42,39	72,88
Hasil Retribusi Daerah	86.43	86.4	86	90,17	81,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	95.17	95.2	95	100	108,98
Lain2 PAD yang syah	84.97	85.0	85	110,86	121,67
Dana Perimbangan	100,52	100,	101	99,73	98,52
Dana Bagi Hasil Pajak	112.26	112.3	112	92,05	92,61
Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	119,51	
Dana Alokasi Umum	100	100	100	100	100
Dana Alokasi Khusus	100	100	100	100	89,23
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.04	55.0	55	108,80	100,19
Pendapatan Hibah	37.43	37.4	37		

URAIAN	Kinerja/Realisasi (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62,55	62,5	63	113,38	102,13
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	108,39	90,81
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	108,15	108,1	108	100	

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

2) Belanja Daerah

a. Realisasi Belanja

Realisasi belanja daerah Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2014 menunjukkan trend penyerapan yang tidak menggembirakan. Setelah mencapai angka 93,53% pada tahun 2009, menurun menjadi 90,31% pada tahun 2010 dan 87,80% pada tahun 2011. Setelah kembali meningkat menjadi 89,09% pada tahun 2012, realisasi belanja daerah Kabupaten Ende tahun 2013 mengalami penurunan signifikan pada angka 83,43%.

Telaahan berdasarkan jenis belanja menunjukkan tingkat realisasi Belanja Langsung yang tidak menggembirakan, dibanding Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung menunjukkan trend yang terus menurun selama kurun waktu 2009-2014. Setelah pada tahun 2009 pada angka 90,58%, terus mengalami penurunan dan terakhir pada tahun 2013 realisasi belanja langsung hanya sebesar 68,06%.

Tabel 3.4. Persentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ende 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
	BELANJA	93,53	90,31	87,80	89,09	83,43
1	Belanja Tidak Langsung	95,43	99,09	99,01	99,00	93,26
a	Belanja Pegawai	95,02	99,18	99,47	99,62	93,77
b	Belanja Hibah	79,00	97,99	95,76	88,43	87,56
c	Belanja Bantuan Sosial	93,95	99,99	96,64	34,93	39,44
d	Belanja Bantuan Keuangan	102,00	99,19	97,94	99,87	97,89
e	Belanja Tidak Terduga	60,67	3,38	6,69	3,24	30,66
f	Belanja Bagi Hasil	65,68	98,98	98,98	-	89,73
2	Belanja Langsung	90,58	74,50	70,18	73,54	68,06
a	Belanja Pegawai	90,76	97,44	94,31	96,26	81,04
b	Belanja Barang dan Jasa	92,91	92,37	95,09	94,92	86,74
c	Belanja Modal	89,29	58,29	55,69	60,04	53,21
	JUMLAH	93,53	90,31	87,80	89,09	83,43

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

b. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

Dalam rangka perkiraan belanja wajib atau mengikat, diperhitungkan rata-rata Belanja Tidak Langsung. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2014 adalah sebesar 13,29 persen, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen belanja tidak langsung disajikan pada table berikut.

Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung

U R A I A N	2010 (jutaan)	2011 (jutaan)	2012 (jutaan)	2013 (jutaan)	APBD 2014 (jutaan)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Tidak Langsung	283,848	323,847	417,121	442,889	529,750	13.29
Belanja Pegawai	277,772	308,085	357,484	374,063	460,763	10.65
Belanja Hibah	2,443	16,081	7,200	20,066	11,304	35.85
Belanja Bantuan Sosial	2,574	5,551	408	1,695	4,309	10.85
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes	395	395	-	358	-	-100.00
Belanja Bantuan Keu kepada Prov/ Kab / Kota/ Pemdes dan Parpol	39,853	37,272	42,663	46,398	52,372	5.62
Belanja Tidak Terduga	807	207	9,364	306	1,000	4.38

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

Berdasarkan gambaran kinerja pelaksanaan APBD, beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan keuangan selama kurun waktu 2014- 2019, meliputi :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, diperlukan terobosan dalam upaya meningkatkan PAD secara signifikan, dengan mengintensifkan penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Peningkatan PAD juga akan mengurangi ketergantungan fiskal keuangan dari pemerintah dan pemerintah Provinsi NTT.
2. Koordinasi dan keterpaduan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dana bantuan keuangan provinsi serta pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerhatikan realisasi pendapatan hibah yang tidak diterima sejak Tahun 2011, diperlukan langkah atau terobosan untuk mendapatkan peluang penerimaan dari komponen ini. Peluang penerimaan dari Dana Hibah menjadi perhatian sejalan dengan kebijakan CSR (*corporate social responsibility*), serta kebijakan hibah daerah dari pemerintah pusat sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4. Dalam rangka mempercepat pencapaian target, perlu diintensifkan peluang pendanaan yang bersumber dari luar APBD Kabupaten, seperti pendanaan APBN melalui dana Tugas Perbantuan, dukungan pendanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta koordinasi pendanaan bantuan atau hibah luar negeri yang harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Ende.
5. Rendahnya penyerapan anggaran, khususnya pada belanja investasi (belanja modal). Data menunjukkan penyerapan belanja modal terus menurun selama kurun waktu 2009-2013, yaitu dari keadaan 89,29% pada tahun 2009, terus menurun dan terakhir pada tahun 2013 sebesar 53,21%. Hal ini sangat krusial karena penyerapan anggaran yang rendah akan signifikan menghambat daya dorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas layanan publik.
6. Perubahan kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja daerah kurun waktu periode rencana 2014-2019, yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta peraturan pelaksanaan ikutannya;
 - b. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi tambahan penerimaan pada Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN, alokasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari PDRD, serta alokasi dana bantuan keuangan untuk desa dan desa adat yang bersumber pada penerimaan APBN.
7. Data rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam proyeksi pendapatan dan belanja, selain perkiraan asumsi pertumbuhan ekonomi, kebijakan pendapatan, dan perubahan kebijakan keuangan negara.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah, pihak legislatif maupun para kreditur / pemberi modal pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Data menunjukkan bahwa aset pemerintah Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,24%. Aset pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2009 kurang lebih Rp 1,046 Trilyun, terus mengalami peningkatan dan kondisi terakhir pada tahun 2013 sebesar

kurang lebih Rp 1,435 Trilyun. Proporsi terbesar aset pemerintah Kabupaten Ende merupakan Aset Tetap, dimana keadaan tahun 2013 menyumbang sebesar 84,20% keseluruhan aset daerah. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan, serta konstruksi dalam bangunan, akumulasi penyusutan dan aset tetap lainnya.

Data kewajiban daerah, menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Ende tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Kewajiban daerah hanya pada kewajiban jangka pendek, yang meliputi utang perhitungan kepada pihak ketiga (PFK), utang pajak dan utang jangka pendek lainnya. Besaran kewajiban sampai keadaan tahun 2013 sebesar kurang lebih Rp 8,552 Milyard dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2009-2014 sebesar 633%.

Ekuitas dana pemerintah Kabupaten Ende mengalami pertumbuhan sebesar 8,08%, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp 1,046 Trilyun menjadi Rp 1,427 Trilyun pada keadaan tahun 2013. Proporsi ekuitas dana terbesar merupakan ekuitas dana investasi dengan proporsi pada kisaran di atas 91,25%. Secara khusus tinjauan terhadap ekuitas dana lancar menunjukan trend meningkatnya Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 45,40%. Data terakhir kondisi SILPA Kabupaten Ende tahun 2013 sebesar Rp 121 Milyard.

Perkembangan neraca daerah periode Tahun Anggaran 2009 – 2013 dan rata-rata pertumbuhannya seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Neraca Daerah Kabupaten Ende 2009-2013

No.	Uraian	Tahun (dalam jutaan)					Rata-rata Pertumbuhan
		2009	2010	2011	2012	2013	
A.	ASET						
1.	Aset Lancar						
1.1	Kas	30.680	30.208	58.868	77.266.	121.285	45,39
	Kas Di Kas Daerah	27.630.	26.769	54.448	75.453	115.148	47,87
	Kas Di Bendahara Penerimaan	-	112	1.468	1.306	18	363,84
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	3.050	3.326	2.950	507	741	-9,70
	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah			-	-	5.378	0,00
1.2	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Piutang	4.826	4.343	5.254	4.155	6.335	10,63
	Piutang Pajak	117	171	39	63	376	131,29
	Piutang Retribusi	85	101	213	472	630	70,75
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	6	6				-25,00
	Bagian Lancar Piutang TP/TGR	3.530	3.530				-25,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah			-	-	37	0,00
	Piutang Dana Bagi Hasil			1.464	-	1.660	-25,00
	Piutang Lain-lain	1.085	533	3.536	3.620	3.631	128,77
1.4	Persediaan	2.263	4.551	5.622	6.844	5.843	32,92
	Jumlah Aset Lancar	37.770	39.103	69.744	88.267	133.465	39,91

No.	Uraian	Tahun (dalam jutaan)					Rata-rata Pertumbuhan
		2009	2010	2011	2012	2013	
2.	Investasi Jangka Panjang						
	Investasi Non Permanen Lainnya	9.274	11.997	5.474	5.393	4.930	-8,77
	Jumlah Investasi Non Permanen	9.274	11.997	5.474	5.393	4.930	-8,77
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.246	16.196	12.699	18.261	18.498	11,44
	Jumlah Investasi Permanen	13.246	16.196	12.699	18.261	18.498	11,44
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	22.521	28.194	18.174	23.655	23.429	4,71
3.	Aset Tetap						0,00
	Tanah	131.765	131.392	125.554	126.031	126.031	-1,09
	Peralatan dan Mesin	106.640	125.337	129.127.	151.883	163.230	11,41
	Gedung dan Bangunan	351.719	357.710	324.648	354.500	371.112	1,59
	Jalan, Jaringan dan Instalasi	376.941	393.603	415.583	463.533	492.963	6,97
	Aset Tetap Lainnya	12.093	12.474	13.946	20.105	20.294	15,01
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	14.124	13.818	5.459	35.391	161,87
	Jumlah Aset Tetap	979.160	1.034.643	1.022.678	1.121.514	1.209.024	5,49
4.	Dana Cadangan						
	Dana Cadangan			-	7.000.	-	-25,00
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	7.000	-	-25,00
5.	Aset Lainnya						0,00
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			6.123	6.279	7.192	8,55
	Aset Lain-lain	7.165	6.539	68.416	62.727	62.750	232,31
	Jumlah Aset Lainnya	7.165	6.539	74.539	69.006	69.943	256,28
	JUMLAH ASET	1.046.617	1.108.480	1.185.137	1.309.443	1.435.862	8,24
B.	KEWAJIBAN						
1.	Kewajiban Jangka Pendek						0,00
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.	247	-	2.488	26	95,15
	Utang Pajak			4	68.	-	622,12
	Utang Jangka Pendek Lainnya			125	-	8.526.	-25,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	42	247	130	2.556	8.552	633,20
2.	Kewajiban Jangka Panjang						0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	42	247	130	2.556	8.552	633,20

No.	Uraian	Tahun (dalam jutaan)					Rata-rata Pertumbuhan
		2009	2010	2011	2012	2013	
C.	EKUITAS DANA						
1.	EKUITAS DANA LANCAR						0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	30.638	29.848	57.298	75.872	121.239	45,40
	Cadangan Untuk Piutang	4.826	4.343	5.254	4.155	6.335	10,63
	Cadangan Untuk Persediaan	2.263	4.551	5.622	6.844	5.843	32,92
	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek			(32)	(2.481)	(8.526)	3886,37
	Pendapatan yang Ditangguhkan		112	1.472	1.318	20	365,17
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	37.728	38.856	69.614	85.710	124.912	37,75
2.	EKUITAS DANA INVESTASI						0,00
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	22.521	28.194	18.174	23.655	23.429	4,71
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	979.160	1.034.643	1.022.678	1.121.514	1.209.024	5,49
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	7.165	6.539	74.539	69.006	69.943	256,28
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.008.847	1.069.377	1.115.392	1.214.176	1.302.396	6,61
3.	EKUITAS DANA CADANGAN						0,00
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	7.000	-	-100,00
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		-	-	7.000	-	-25,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.046.575	1.108.233	1.185.006	1.306.886	1.427.309	8,08
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.046.617	1.108.480	1.185.137	1.309.443	1.435.862	8,24

Sumber : Laporan Keuangan (diolah)

Dari data neraca selanjutnya dilakukan analisa kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, maupun kemampuan dalam penyediaan dana pembangunan sebagai berikut:

1. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek

Kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek ditunjukkan dengan ratio lancar dan ratio quick. Berdasarkan hasil perhitungan nilai **rasio lancar** neraca keuangan pemerintah kabupaten Ende tahun 2009 sebesar 893, menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 158, kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 534, dan kemudian menurun menjadi 34,52 dan 15,60 pada tahun 2012 dan 2013. Relatif sama dengan ratio lancar, **ratio quick** juga menunjukkan indikasi yang sama. Pada tahun 2009, Ratio quick pemerintah Kabupaten Ende sebesar 839, terus menurun dan pada keadaan dua terakhir yaitu 2012 dan 2013 menunjukkan penurunan signifikan.

Dari nilai ratio lancar dan ratio quick ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Ende masih mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancar, dengan tetap memerhatikan bahwa penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2012 dan 2013 memberi indikasi agar lebih berhati-hati dalam mengelola aset lancar, dalam rangka menjamin terpenuhinya kewajiban jangka pendek secara baik.

2. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang

Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang ditunjukkan dengan **ratio solvabilitas**. Ratio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total hutang terhadap total aset dan total hutang terhadap modal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Ende cukup baik. Ratio hutang pemerintah Kabupaten Ende terhadap total aset sangat kecil yaitu sebesar 0,0000404 pada tahun 2009, dan terakhir pada tahun 2013 sebesar 0,0059565. Nilai ratio hutang terhadap modal juga menunjukkan indikasi yang sama, yaitu sebesar 0,0000404 pada tahun 2009, meningkat menjadi 0,0059922 pada tahun 2013. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun masih berada pada toleransi dibawah 0,75. Angka ratio solvabilitas ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009-2014 pemerintah Kabupaten Ende cukup kuat untuk membayar utang jika melakukan pinjaman jangka panjang.

3. Ratio Aktivitas

Ratio aktivitas untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efisiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Ratio Likuiditas, Solvabilitas dan Ratio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
RATIO LANCAR DAN QUICK						
1	Rasio Lancar (current ratio)	893,08	158,21	534,93	34,52	15,60
2	Rasio Quick (quick ratio)	839,55	139,80	491,81	31,84	14,92
RATIO SOLVABILITAS						
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0000404	0,0002230	0,0001100	0,0019527	0,0059565
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0000404	0,0002230	0,0001100	0,0019565	0,0059922
RATIO AKTIVITAS						
5	Rata-rata umur piutang	1,97	1,82	1,77	1,90	3,94
6	Rata-rata umur persediaan	1,83	3,60	3,70	3,88	3,09

Sumber : Laporan Keuangan (diolah dan dihitung)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009 – 2013

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Telaahan proporsi penggunaan anggaran dilakukan untuk menelaah besaran pemenuhan belanja aparatur terhadap keseluruhan belanja daerah. Selama periode tahun 2009-2014, rata-rata belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 77,31%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan alokasi belanja untuk kepentingan publik masih sangat rendah.

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No.	Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Jutaan)	Total Pengeluaran (jutaan)			Presentase (%)
			Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah	
1	2009	392.395	456.818.	-	456.818.	85,90
2	2010	348.724	459.077.	2.950.	462.027.	75,48
3	2011	404.242	531.705	-	531.705	76,03
4	2012	471.211	614.515	9.030.	623.545	75,57
5	2013	479.269	649.418	2.000	651.418	73,57
Rata-rata						77,31

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

Dari telaahan lebih lanjut terkait komposisi belanja aparatur, menunjukkan bahwa besaran alokasi pemenuhan belanja aparatur, sebagian besar merupakan alokasi untuk belanja pegawai yaitu sebesar 71,94% dan belanja modal aparatur dengan rata-rata sebesar 20,33%.

Memerhatikan kondisi ini, maka dalam rangka peningkatan alokasi belanja publik, kebijakan yang dapat diambil adalah penghematan pada belanja modal aparatur antara lain dengan efisiensi dana operasional kendaraan dinas, pertimbangan ketersediaan aset dalam rangka pengadaan peralatan kantor, serta peralatan gedung kantor. Selain itu dilakukan pula efisiensi pada komponen honorarium PNS, pembatasan biaya lembur, belanja makan minum pegawai dan pembatasan pengadaan pakaian dinas dan atribut. Selengkapnya data proporsi jenis belanja aparatur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Ende Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
A. Belanja Tidak Langsung							
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	63,48	73,57	73,17	72,87	76,60	71,94
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	7,03	5,70	2,69	2,71	1,27	3,88
B. Belanja Langsung							
1.	Belanja Honorarium PNS	1,18	1,12	1,08	0,83	1,32	1,10
2.	Belanja Uang Lembur	0,57	0,27	0,28	0,34	0,28	0,35
3.	Belanja Premi Askes	-	0,21	0,06	0,05	0,05	0,07
4.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	0,01	-	0,01	0,00

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
5.	Belanja makanan dan minuman pegawai	1,18	1,54	1,50	1,29	1,21	1,35
6.	Belanja Modal (Kantor, Mobil dinas, Mebelair dll)	25,62	16,26	20,45	21,04	18,27	20,33
7.	Belanja Beasiswa pendidikan PNS	-	0,09	-	0,14	0,22	0,09
8.	Belanja pelatihan, sosialisasi, bimtek PNS	0,88	1,13	0,73	0,72	0,63	0,82
9.	Belanja pakaian dinas dan atribut	0,05	0,10	0,04	0,00	0,16	0,07
Total		100	100,	100	100	100	100

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.

Analisis pembiayaan yang relevan pada perumusan kebijakan RPJMD adalah yang terkait dengan **kondisi defisit riil anggaran** dan **komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** selama kurun waktu 2009-2014. Dengan mengetahui kondisi riil defisit dan komponen penutup dapat dirumuskan kebijakan pembiayaan daerah untuk periode rencana 2014-2019.

Data menunjukan bahwa selama kurun waktu 2009-2014 terjadi defisit dan surplus anggaran APBD Kabupaten Ende. Defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Ende pada Tahun 2009 sebesar 5,6 Milyard, menurun menjadi 789 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2011 terjadi surplus anggaran sebesar 23 Milyard, kemudian menurun menjadi 19 Milyard pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 38,6 Milyard pada tahun 2013.

Tabel 3.10. Defisit riil kabupaten Ende 2009-2013

NO	Uraian	Tahun Anggaran				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	451.121	461.238	555.240	643.314	689.785
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	456.818	459.077	531.705	614.515	649.418
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	2.950	0	9.030	2.000
	Defisit riil (1 - 2+3)	(5.696)	(789)	23.535	19.769	38.367

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

Selanjutnya dari analisis keseluruhan Penerimaan Pembiayaan, serta kondisi defisit/surplus APBD, diketahui bahwa terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA). Besaran SiLPA pada tahun 2009 sebesar 36 Milyard, menurun menjadi 29,8 Milyard pada tahun 2010, kemudian meningkat menjadi 57 Milyard pada tahun 2011, 75 Milyard pada tahun 2012, dan menjadi 121 Milyard pada tahun 2013. Secara khusus terkait kebijakan pembiayaan daerah, terdapat penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar 3,1 Milyard pada tahun 2011, dan pencairan dana cadangan untuk Pileg sebesar 7 Milyard pada tahun 2013.

Adapun keseluruhan defisit riil dan uraian komponen penutup defisit dan besaran SILPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Gambaran defisit riil dan komponen Penutup Defisit Riil kabupaten Ende 2009-2013

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	451.121	461.238	555.240	643.314	689.785
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	456.818	459.077	531.705	614.515	649.418.
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	2.950		9.030.	2.000
A	Defisit riil (1 - 2+3)	(5.696)	(789)	23.535	19.769	38.367
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	36.334.	30.638	30.565	56.102	75.872.
5.	Pencairan Dana Cadangan					7.000
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			3.195		
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah (4+5+6)	36.334	30.638	33.760	56.102	82.872
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) (A – B)	30.638	29.848	57.295	75.872	121.239

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

Dari data SILPA, selanjutnya diperhitungkan potensi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran untuk kurun periode perencanaan 2015-2019, yaitu dengan mengurangi SILPA dengan pengeluaran wajib kepada pihak ketiga sampai akhir tahun yang belum diselesaikan, dan kegiatan lanjutan. Pengeluaran wajib dan kegiatan lanjutan, merupakan bagian komponen pembentuk SiLPA, selain komponen pelampauan target pendapatan dan sisa penghematan atau efisiensi belanja. Secara lengkap uraian komponen realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.12. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ende 2009-2014

Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
Jumlah SiLPA	30.638	100	29.848	100	57.296	100	75.872	100.	121.027	100
Pelampauan penerimaan PAD	(2.8940)	-9,45	(5.973)	-20	(6.867)	-12	(1.204.)	-1,59	941.	0,78
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	586.362.	1,91	(6.602.)	-22	(10.408)	-18	3.021.	3,98	8.645.)	-7,14
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.469.	8,06	(6.817.)	-23	-	0	-	0,00	-	0,00
Sisa penghematan belanja	31.600.	103	35.117	118	60.036	105	69.791	91,99	93.551	77,30
Kewajiban kepada pihak III sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00	14.124	47	13.818	24	5.459	7,20	35.391	29,24
Kegiatan lanjutan		0,00		0		0		0,	23.608.	19,51

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menggambarkan rencana pendanaan pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu RPJMD 2014-2019. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengeluaran periodik wajib dan terikat
2. Melakukan proyeksi data pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
3. Menghitung kapasitas keuangan riil daerah
4. Mengalokasikan kapasitas riil keuangan berdasarkan urutan Prioritas Pengeluaran Daerah (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Adapun komponen pengeluaran wajib dan mengikat meliputi gaji dan tunjangan pegawai, gaji anggota dewan, bunga, jasa kantor (listrik, air dan telepon) dan belanja beasiswa dengan ikatan kontrak yang jelas.

Data 2009-2013 menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan belanja gaji adalah sebesar 9,81 %, dengan besaran pada Tahun 2013 sebesar 374 Milyard. Komponen belanja beasiswa menunjukkan angka fluktuatif, sedangkan untuk komponen jasa kantor pada kisaran 3 Milyard sampai dengan 6 Milyard, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,84%. Selain itu terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan sebesar 7 Milyard untuk dukungan pelaksanaan Pileg dan Pemilu pada tahun 2012.

Tabel 3.13 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Ende 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG						
Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan)	234.324	277.772	307.100	357.484	374.063	9,81
BELANJA LANGSUNG						
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	324	-	669	1.040	
Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	3.217	3.708	6.088	4.819	6.151	13,84
PEMBIAYAAN PENGELUARAN						
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	7.000	-	
TOTAL	237.542	281.805	313.188	362.974	381.255	

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

3.3.2. Proyeksi Data Keuangan Daerah

1. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan didasarkan pada trend rata-rata pertumbuhan pendapatan kurun waktu 2009-2014 dan pertimbangan lainnya yang meliputi asumsi pertumbuhan ekonomi, kebijakan pendapatan, dan perubahan kebijakan keuangan negara. Proyeksi ini merupakan angka perkiraan yang dapat berubah atau bersifat indikatif sepanjang asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Asumsi yang menjadi dasar Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019 meliputi:

1. Perkembangan ekonomi daerah relatif stabil dengan pertumbuhan rata-rata diperkirakan di atas 5 %
2. Adanya perluasan basis pajak dan retribusi daerah
3. Pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
4. Pemberlakuan kebijakan alokasi dana desa sesuai Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Adanya peningkatan daya beli masyarakat sebagai implikasi meningkatnya kegiatan ekonomi atau usaha masyarakat;
6. Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah diprediksikan meningkat
7. Situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif

Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh proyeksi pendapatan daerah Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Ende Tahun 2015-2019

URAIAN PENDAPATAN	Proyeksi Pendapatan (dalam jutaan)				
	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL PENDAPATAN	1.128.000	1.227.410	1.339.063	1.464.658	1.606.171
Pendapatan Asli Daerah	59.000	70.885	85.396	103.150	124.908
Hasil Pajak Daerah	16.000	19.200	23.040	27.648	33.177
Hasil Retribusi Daerah	14.000	15.423	16.992	18.719	20.623
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.500	4.104	4.813	5.644	6.619
Lain2 PAD yang syah	29.500	36.156	44.551	55.137	68.487
Dana Perimbangan	693.000	765.157	844.830	932.800	1.029.933
Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak	11.000	12.100	13.310	14.641	16.105
Dana Alokasi Umum	605.000	668.357	738.350	815.672	901.092
Dana Alokasi Khusus	77.000	84.700	93.170	102.487	112.735
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah	372.000	387.368	404.836	424.708	447.330
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-

URAIAN PENDAPATAN	Proyeksi Pendapatan (dalam jutaan)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.000	18.000	21.600	25.920	31.104
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100.000	112.168	125.816	141.126	158.298
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928
Alokasi Dana Desa (UU No 6 Tahun 2014)	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

2. Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Memerhatikan perkembangan data 2009-2014, pengeluaran periodik terikat dan wajib untuk tahun 2015-2019 diproyeksikan dengan dasar asumsi sebagai berikut:

- Belanja pegawai diasumsikan mengalami kenaikan 9,5%. Hal ini didasarkan pertimbangan rata-rata pertumbuhan (9,81%), dan kondisi riil realisasi belanja yang tidak mencapai 100% atau terdapat sisa belanja pegawai dari target yang direncanakan.
- Belanja beasiswa tidak didasarkan pada trend pertumbuhan, namun dilaksanakan secara selektif, dengan asumsi tahun 2015 sebesar 250 juta, dan mengalami kenaikan 50 juta setiap tahunnya;
- Belanja Jasa kantor diasumsikan pada tahun 2015 sebesar 5 Milyard untuk 77 SKPD. Asumsi ini didasarkan pada data kisaran belanja jasa kantor kurun waktu 2009-2014. Selanjutnya setiap tahun diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun sebelumnya.
- Pengeluaran untuk pembiayaan diasumsikan pada tahun 2017 yang diperuntukan untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada sebesar 10 Milyard.

Dari asumsi ini diproyeksikan besaran Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat kurun waktu 2014-2019 sebagai berikut.

Tabel 3.15 Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan) Termasuk Operasional KDH	500.000	547.500	599.512	656.466	718.830
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	248	300	350	400	450
Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya	5.000	5.250	5.512	5.788	6.077
Pembentukan Dana Cadangan			10.000		
Total	505.248	553.050	615.375	662.654	725.358

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan sesuai dengan arahan prioritas pembangunan. Perkiraan kapasitas riil keuangan daerah merupakan selisih penerimaan daerah dengan pengeluaran periodik wajib dan mengikat.

Penerimaan Daerah meliputi Proyeksi Pendapatan Daerah, Sisa Lebih (riil) perhitungan Anggaran dan Rencana Pencairan Cadangan. Gambaran Kemampuan riil keuangan daerah disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.16 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2014-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan	1.128.000	1.227.410	1.339.063	1.464.658	1.606.171
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	10.000	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	59.000	53.100	47.790	43.011	38.709
Total Penerimaan (1+2+3)		1.187.000	1.280.510	1.386.853	1.517.669	1.644.881
5	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta prioritas utama	505.248	553.050	615.375	662.654	725.358
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (1+2+3)-4		681.751	727.460	771.478	855.015	919.523

Sumber : Dokumen APBD dan Laporan Keuangan (diolah)

Dari tabel di atas diketahui besaran Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende untuk 5 Tahun ke depan, adalah sebesar Rp 3,9 Trilyun., dengan rincian pendanaan setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Proyeksi Tahun 2015 : Rp 681,7 Milyard
2. Proyeksi Tahun 2016 : Rp 727,4 Milyard
3. Proyeksi Tahun 2018 : Rp 771,4 Milyard
4. Proyeksi Tahun 2018 : Rp 854,1 Milyard
5. Proyeksi Tahun 2019 : Rp 919,5 Milyard

Kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada merupakan modal pemerintah Kabupaten Ende selama kurun waktu 2014-2019 dalam membiayai :

- a. Rencana alokasi **pengeluaran prioritas I**, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Bupati dan Wakil Bupati Ende dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Program pada prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah;
- b. Rencana alokasi **pengeluaran prioritas II**, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Rencana alokasi **pengeluaran prioritas III**, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Secara rinci uraian rencana pembiayaan pembangunan berdasarkan rencana Prioritas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende 2015-2019

No	Uraian	Proyeksi (jutaan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Prioritas I	478.950	484.098	489.443	494.573	498.993
1	Program Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan					
*	PIDES/PIKEL (pendekatan 20% pendidikan, 10% kesehatan, 35% infrastruktur, 25% ekonomi, 10 % lain-lain)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
*	Dana Pengembangan Kecamatan	6.000	7.200	8.640	10.368	12.441
2	Prioritas Utama Lainnya					
*	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12.200	13.840	15.808	18.169	21.003
*	Jalan Paralel, Pesta Danau Kelimutu, Prosesi Kebangsaan, Segitiga Membangun Kabupaten Ende, Pengembangan Bumdes/Informasi Komoditi	5.750	8.058	9.995	11.036	10.548
3	Alokasi Dana Desa sesuai pasal 72 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 2014	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
B	Prioritas II	100.535	120.642	144.771	173.725	208.470
1	Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor selain Jasa Kantor	28.205	33.846	40.616	48.739	58.487
2	Program dan Kegiatan (Top down) SKPD	66.330	79.596	95.515	114.618	137.541
3	Jasa Pendukung (Kontrak Daerah)	6.000	7.200	8.640	10.368	12.441
C	Prioritas III	102.266	122.719	147.263	176.716	212.059
1	Tambahan Tunjangan berdasarkan geografis tempat kerja	39.360	47.232	56.678	68.014	81.616
2	Bansos	4.000	4.800	5.760	6.912	8.294
3	Hibah	3.906	4.687	5.625	6.750	8.100
4	Belanja Tidak Terduga	1.000	1.200	1.440	1.728	2.073
5	Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol	52.000	62.800	75.760	91.312	109.974
6	Penyertaan Modal	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TOTAL (A+B+C)		681.751	727.460	781.478	845.015	919.523

3.4. Sinergi Keuangan Daerah dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya

Keefektifan pengelolaan keuangan daerah didukung sumber pembiayaan pembangunan lain untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu dibutuhkan sinergitas pengelolaan keuangan daerah dengan keuangan lainnya melalui dana APBD provinsi, APBN, hibah lembaga internasional, investasi swasta dan dana CSR.

1. Dana APBD Provinsi

Kontribusi nyata pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2009 – 2013 melalui program pembangunan dari berbagai sektor cukup signifikan. Intervensi pembangunan oleh pemerintah provinsi kurun waktu 2014-2019 sesuai RPJMD Provinsi NTT 2013-2018 yang dapat disinergikan dengan program Kabupaten Ende antara lain kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, pembangunan daerah terpadu berbasis desa/kelurahan (Desa Pertanian Terpadu, Desa Pesisir Terpadu, Desa Wisata Terpadu, Desa Pertambangan/industri Terpadu, Kelurahan Jasa terpadu), program percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan NTT 2014-2018, program P2LDT dengan fokus pembangunan 5 rumah per desa di 589 desa/kelurahan per tahun, pembangunan 50 desa wisata per tahun, tambahan modal koperasi, penghijauan berbasis masyarakat untuk 50 desa per tahun, dan dukungan pengembangan wisata andalan Danau Kelimutu.

2. Dana APBN

Sumber pembiayaan pembangunan dana APBN melalui intervensi Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 yang dikelola oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ende sejak tahun 2009 – 2013 sebesar Rp. 215.887.600.612,-. Sejalan dengan penguatan koordinasi diharapkan meningkat untuk tahun-tahun mendatang. Kebijakan pokok yang diambil adalah sinergi antar program dan kegiatan yang saling memperkuat.

3. Dana Hibah Lembaga Internasional

Sinergi pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan dengan pembiayaan pembangunan hibah lembaga internasional. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan dana hibah internasional, maka sejak awal perencanaan perlu diintegrasikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional pembangunan daerah. Beberapa lembaga internasional yang telah bermitra dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende antara lain lembaga AusAID, AIPMNH, dan Unicef, WVI (Wahana Visi Indonesia), Swiss Contact, VSO, Child Fund (ex CCF) dan Wetland International.

4. Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi tertuang melalui kerjasama Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab bersama sosial perusahaan antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan perusahaan Nasional dan BUMN. Program nyata CSR oleh perusahaan/BUMN yang telah dilaksanakan antara lain dengan PT. Telkomsel, PT. Rekadaya Elektrikal/PLTU Ropa, dan PT. PLN (Persero Unit Induk Pembangunan XI unit Pelaksanaan Konstruksi 3, PT. Pertamina dan Bank Mandiri.

Selanjutnya untuk periode rencana telah disepakati beberapa program CSR seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Program CSR yang telah disepakati

No.	Perusahaan/BUMN	Program
1.	Bank BNI, Tbk	Pembangunan 1 buah halte dalam kota Ende dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000 dan satu buah jam kota dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000 Pembangunan tempat penjualan bagi pedagang kaki lima di Pantai Ria
2.	PT. Bank NTT	Pengembangan taman di pertigaan Wolowona dan taman kota cabang Ipi Pembangunan tempat penjualan bagi pedagang kaki lima di Pantai Ria
3.	PT. Hasrat Abadi	Pembangunan jam kota yang berlokasi di monument Pancasila lampu Lima
4.	PT. Sokoria Geothermal	Pengelolaan air bawah tanah untuk kebutuhan pemenuhan air bersih
5.	PT. Pertamina	Pembangunan 4 titik sarana air bersih masyarakat meliputi Desa Detusoko Barat, Desa Ngumbelaka, Kelurahan Watuneso dan Desa Kotabaru
6.	PT. PLN (Persero Unit Induk Pembangunan XI Unit Pelaksanaan Konstruksi 3	Pemberian bantuan semen dan seng bagi pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat Pembangunan tempat penjualan bagi pedagang kaki lima di km 14 Desa Dunga Kecamatan Ende Timur
7.	UD. Nirmala	Pekerjaan pengecatan tembok fasilitas umum di kota Ende
8.	Distributor Air Kemasan Ruteng	Bantuan air minum kemasan untuk penanggulangan bencana
9.	PT. Philips	Pekerjaan lampu di taman situs Bung Karno
10.	Telkomsel	Pemasangan papan himbauan elektrik terkait pesan dan informasi pembangunan
11.	Hero Swalayan	Bantuan material seng untuk pembangunan rumah layak huni
12.	PT. Yeti darmawan	Dukungan pembangunan lampu taman dalam kota Ende